



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan

Analysis of Factors Affecting Audit Delay in the Government of South Sumatra Province

^{1)*} Dhea Tasvania Ramadhani, ²⁾ Sulaiman, ³⁾ Nurhasanah

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

Email: ^{1)*}dheatasvaniaramadhani28@gmail.com, ²⁾rahmat1249@gmail.com,

³⁾Nurhasanahrizkyramadhan@gmail.com

*Correspondence: Dhea Tasvania Ramadhani

DOI:

10.36418/comserva.v2i4.2
46

ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan : 02-08-2022

Diterima : 17-08-2022

Diterbitkan : 26-08-2022

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan leverage berpengaruh terhadap audit delay di pemerintahan provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan daftar kepala daerah yang dikeluarkan oleh Permendagri. Analisa data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan leverage secara simultan Tidak berpengaruh terhadap audit delay. Secara parsial tingkat kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap audit delay sedangkan ukuran pemerintah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan leverage tidak berpengaruh terhadap audit delay pemerintahan provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: Tingkat Kemandirian Daerah; Audit Delay

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of government size, level of regional independence, audit findings, re-election of regional heads and leverage on audit delay in the South Sumatra provincial government. The data collection technique used in this study is to use secondary data in the form of Audit Reports (LHP) and a list of regional heads issued by Permendagri. The results of this study indicate that government size, regional independence level, audit findings, re-election of regional heads and leverage simultaneously have no effect on audit delay. Partially, the level of regional independence has a significant effect on audit delay, while government size, audit findings, re-election of regional heads and leverage have no effect on audit delay in the South Sumatra provincial government.

Keywords: Regional Independence Level; Audit Delay

PENDAHULUAN

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat berupa Laporan Keuangan yang dibuat untuk menilai atau melihat kinerja keuangan suatu instansi ([Arum Ardianingsih](#), 2021). Diperlukan sistem pelaporan yang baik dan berguna bagi masyarakat dan pemakai laporan keuangan lainnya ([Defitri](#), 2018). Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 ([Indonesia](#), 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

Pada Sektor Pemerintahan, Laporan Keuangan dikenal dengan nama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Ketepatan waktuan dalam penyampaian laporan keuangan adalah hal yang wajib dilaksanakan ([Astuti](#), 2007). Hal ini berkaitan dengan Penyampaian Laporan Keuangan memiliki batas waktu seperti yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.” ([Calderón Rojas](#), 2003).

Audit delay merupakan keterlambatan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD ([Aprila et al.](#), 2017). BPK harus menjalankan tugasnya untuk menyampaikan LHP sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan agar tidak terjadi audit delay. Audit delay yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan ([Wiryakriyana & Widhiyani](#), 2017).

Data Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang mengalami Audit Delay berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar Kabupaten/Kota yang mengalami Audit Delay Di Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun	Kabupaten	Kota
1	2018	-	-
2	2019	Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir	Lubuk Linggau, Pagar Alam, Palembang
3	2020	-	-

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018-2020

METODE

.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (Martono, 2011). Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan dengan periode 3 tahun yaitu mulai dari tahun 2018-2020.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 51 Kabupaten/Kota dengan menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Berikut daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 1. Daftar Populasi

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Banyuasin
2	Kabupaten Empat Lawang
3	Kabupaten Lahat
4	Kabupaten Maura Enim
5	Kabupaten Musi Banyuasin
6	Kabupaten Musi Rawas
7	Kabupaten Musi Rawas Utara
8	Kabupaten Ogan Ilir
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
13	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
14	Kota Lubuk Linggau
15	Kota Pagar Alam
16	Kota Prabumulih
17	Kota Palembang

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018-2020

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan data yang berhasil dikumpulkan, hasil dan pembahasan dari data penelitian tersebut. Bagian yang akan dibicarakan antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

1. Deskripsi Subyek Penelitian

.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2020.

Tabel 1. Hasil Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2020	51
2	Outlier	(15)
Jumlah sampel setelah outlier		36

Sumber : data diolah

a. Data Outlier

Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau kombinasi (Dharma & Noviari, 2017). Menurut (Agustina & Hakim, 2021) Ada empat penyebab timbulnya data outlier (1) kesalahan dalam mengentri data, (2) gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer, (3) outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi (4) outlier berasal dari populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak berdistribusi secara normal.

2. Hasil Analisis Data

a. Deskriptif Data Statistik

Statistik deskriptif berfungsi sebagai penganalisis data dengan menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan tanpa penggeneralisasian (Fachrurozi & HARYANTO, 2014). Penelitian ini menjabarkan rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dari masing-masing variabel sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay (Rianti & Sari, 2014), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, opini audit, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan leverage (Widagdo & Munir, 2017).

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah	36	1864851692819,07	6075203768451,60	3155569502972,1714	1089869831653,56400
Tingkat Kemandirian Daerah	36	,031602	,114306	,07146804	,025534674
Temuan Audit	36	6,00	23,00	14,0278	4,24591
Terpilihnya Kembali Kepala Daerah	36	0	1	,14	,351
Leverage	36	,001193	,052501	,01316257	,013504616
Audit Delay	36	77	181	140,81	28,053
Valid N (listwise)	36				

Sumber : output spss, 2022

Dari tabel 4.2 menjelaskan bahwa audit delay memiliki nilai minimum 77 hari yaitu di daerah kabupaten Ogan Komering Ulu dan nilai minimum sebesar 181 hari yaitu di kota Lubuk Linggau dengan nilai mean 140,81 hari dan standard deviation 28,053 hari.

Variabel ukuran pemerintah dalam penelitian ini merupakan seberapa banyak total aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam penelitian ini menggunakan Logaritma Natural seluruh jumlah aset yang dimiliki. Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa total aset minimum dimiliki oleh daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan total 1.864.851.692.819,07 dan total aset maximum dimiliki oleh kabupaten Muara Enim dengan total asset sebesar 6.075.203.768.451,60, nilai mean sebesar 3155569502972,1714 dan nilai standard deviation sebesar 1089869831653,56400.

Variabel tingkat kemandirian daerah pada penelitian ini dilihat dari rasio kemandirian masing-masing daerah. Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa rasio kemandirian minimal ada di daerah kabupaten Empat Lawang dengan nilai rasio ,031602 dan rasio kemandirian maximum ada di Kota Lubuklinggau dengan nilai ,114306, nilai mean ,07146804 dan standard deviation sebesar ,025534674.

Variabel temuan audit merupakan permasalahan yang ditemukan oleh auditor di lapangan yang diungkapkan dalam LHP setiap daerah maupun kota. Pada penelitian ini temuan audit dilihat dari banyaknya jumlah temuan yang ditemukan oleh auditor. Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa temuan audit minimum ada di daerah kabupaten Muara Enim dan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan jumlah temuan sebanyak 6 dan nilai maximum temuan audit terdapat di Kota Palembang dengan total temuan sebanyak 23, nilai mean 14,0278 dan standard deviation sebesar 4,24591.

Variabel kepala daerah yang terpilih kembali lebih mengetahui mengenai langkah-langkah persiapan dalam memberikan fasilitas prosedur audit dan standar prosedur akuntansi. Kepala daerah yang terpilih kembali lebih banyak memiliki pengetahuan dari pada kepala daerah yang baru terpilih. Pada penelitian ini terpilihnya kembali kepala daerah dilihat menggunakan dummy, jika kepala daerah tersebut telah menjabat sebanyak 2 periode maka diberi angka (1), sebaliknya jika kepala daerah tersebut baru menjabat menjadi kepala daerah maka diberi angka (0).

Berdasarkan tabel 4.2 banyak kepala daerah yang belum pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kepala daerah yang telah menjabat 2 periode terdapat pada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir, kota Lubuk Linggau, kota Prabumulih dan kota Palembang dengan nilai mean ,14 dan standar deviation sebesar ,351.

Variabel leverage merupakan kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Pada penelitian ini dilihat dari jumlah kewajiban yang dimiliki suatu daerah. Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa kabupaten Banyuasin memiliki nilai minimum sebesar, 001193 pada tahun 2019 dan kabupaten Banyuasin juga memiliki jumlah hutang maksimum dengan nilai hutang sebesar 0,184080609 pada tahun 2020, nilai mean. 01316257 dan nilai standard deviation sebesar,013504616.

b. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan sampel yang diteliti terbebas dari gangguan multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas ([Sukmawati & Faisal, 2015](#)).

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal ([Adisetiawan, 2012](#)).

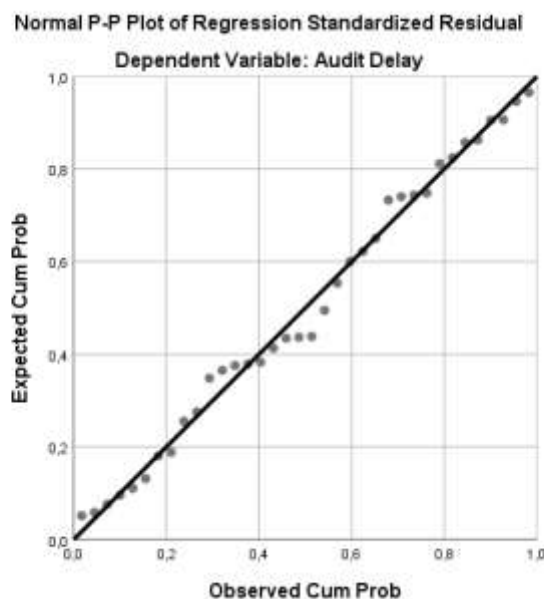
Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	24,90230805
Most Extreme Differences	Absolute	,094
	Positive	,094
	Negative	-,082
Test Statistic		,094
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : output spss, 2022

Dari Tabel 3. diperoleh nilai sig = 0,200 = 20% > 5%. Artinya data yang digunakan berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-P Plot sebagai berikut.

Gambar 4. Grafik Normal P-P Plot



Pada grafik P-P Plot terlihat data menyebar menjauh di sekitar garis diagonal dan hampir mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance $> 10\%$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Berikut ini merupakan hasil output SPSS untuk uji multikolinieritas.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Model 1	Ukuran Pemerintah	,706	1,417
	Tingkat Kemandirian Daerah	,570	1,755
	Temuan Audit	,860	1,162
	Terpilihnya Kembali Kepala Daerah	,744	1,344
	Leverage	,823	1,216

a. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Output SPSS, 2022

Dari Tabel 4.4 terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang acak menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Output SPSS untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,120	13,773		,227	,822
	Ukuran Pemerintah	-2,786E-13	,000	-,022	-,109	,914
	Tingkat Kemandirian Daerah	162,951	121,335	,302	1,343	,189
	Temuan Audit	,731	,594	,226	1,231	,228
	Terpilihnya Kembali Kepala Daerah	-3,133	7,730	-,080	-,405	,688

Leverage	-246,606	190,929	-,242	-1,292	,206
----------	----------	---------	-------	--------	------

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Output SPSS, 2022

Pada Tabel 4.5 dengan jelas menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai sig $\geq 0,05$. Jadi tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011).

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-Test). Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilihat pada tabel Model Summary di bawah ini.

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,460 ^a	,212	,081	26,898	1,982	

a. Predictors: (Constant), Leverage, Ukuran Pemerintah, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah, Temuan Audit, Tingkat Kemandirian Daerah

b. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Output SPSS, 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson menunjukkan nilai DW sebesar 1,982 sedangkan nilai dua diperoleh sebesar 1,7987 berdasarkan tabel Durbin Watson (DW) dengan $K = 5$ dan $n = 36$ $du = 1,7987$. Apabila kita masukan ke dalam rumus $du < d < 4 - du$ ($1,7987 < 1,982 < 2,2013$). Dapat dikatakan bahwa $H_0 =$ tidak ada autokorelasi, positif atau negatif, yang artinya bahwa dalam model tersebut tidak terjadi autokorelasi.

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	
		B	Std. Error	Beta		t
1	(Constant)	169,128	26,776		6,316	,000
	Ukuran Pemerintah	3,970E-12	,000	,154	,800	,430
	Tingkat Kemandirian Daerah	-620,107	235,886	-,564	-2,629	,013
	Temuan Audit	-,475	1,154	-,072	-,412	,683

Terpilihnya Kembali Kepala Daerah	20,382	15,028	,255	1,356	,185
Leverage	555,001	371,183	,267	1,495	,145

a. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Output SPSS, 2022

Berdasarkan Tabel 4.7, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$AD = 169,128 + 3,970 UP - 620,107 TKD - 475 TA + 20,382 TKKD + 555,001 L$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier berganda tersebut sebagai berikut:

- 1) Koefisien regresi variabel ukuran pemerintah (UP) bernilai positif, artinya bahwa setiap berubahnya ukuran pemerintah maka akan meningkatkan bertambahnya hari audit delay.
- 2) Koefisien regresi variabel tingkat kemandirian daerah (TKD) bernilai negatif, artinya bahwa setiap penambahan nilai satu maka tidak akan mempengaruhi bertambahnya hari audit delay.
- 3) Koefisien regresi variabel temuan audit (TA) bernilai negatif, artinya bahwa setiap penambahan satu poin temuan maka akan menambah tingkat audit delay.
- 4) Koefisien regresi variabel terpilihnya kembali kepala daerah (TKKD) bernilai positif, artinya bahwa setiap penambahan satu periode untuk kepala daerah maka akan mengurangi tingkat audit delay.
- 5) Koefisien regresi variabel leverage (L) bernilai positif, artinya bahwa setiap penambahan satu persen leverage maka akan menambah tingkat audit delay.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi ganda (R^2) dapat diketahui bahwa ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan leverage secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen audit delay dan berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel ukuran pemerintah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan leverage terbukti tidak berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan untuk variabel tingkat kemandirian daerah terbukti berpengaruh terhadap audit delay.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisetiawan, R. (2012). Analisis pengaruh kinerja keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(3), 669–681.
- Agustina, T., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS*, 425–437.
- Aprila, N., Fachruzzaman, F., & Pratiwi, D. S. (2017). Pengaruh opini audit dan kualitas auditor terhadap audit delay pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 7(3), 75–86. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.3.75-86>
- Arum Ardianingsih, S. E. (2021). Audit Laporan Keuangan. *Bumi Aksara*.
- Astuti, C. D. (2007). Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 2(1), 27–42. <https://doi.org/10.25105/jipak.v2i1.4425>
- Calderón Rojas, C. (2003). Utilización de la fibra de cáñamo en la industria textil-Una nueva opción para la problemática de los cultivos ilícitos en Colombia.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556.
- Fachrurozi, L., & HARYANTO, H. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Indonesia, R. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jakarta (ID): Sekretariat Negara*.
- Martono, N. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif. *Rajawali Press*.
- Rianti, N. L. P. A. E., & Sari, M. M. R. (2014). Karakteristik komite audit dan audit delay. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(3), 498–508.
- Sukmawati, T., & Faisal, F. (2015). Pengaruh Kompetensi Auditor Dalam Melakukan Audit Judgment Terhadap Kualitas Audit. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 595–604.
- Widagdo, A. K., & Munir, M. B. (2017). Profil kepala daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 303–330.
- Wiryakriyana, A. A. G., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Auditor Switching, dan Sistem Pengendalian Internal Pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(1), 771–798.

1*) Dhea Tasvania Ramadhani, 2) Sulaiman, 3) Nurhasanah

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.